

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, A. 2022. Kebijakan Hukum Agraria dalam Perkembangan Pembentukan Hukum Tanah Nasional di Indonesia. Purbalingga: Eureka Media Aksara Absi,
- Abdussamad, H. Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian Sutedi, 2019. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprilianti Kasmawati. 2022. Hukum Adat di Indonesia. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Boedi Harsono, 2016. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
- Diantha, I. M. P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dillah, H. P., & Suratman, H. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Goenawan, Kian, 2018. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti. Yogyakarta: Best Publisher.
- Harumiati Natadimaja, 2020. Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ishaq, H. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini, A. A. L., & Lubis, A. A. (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Medan: Pustaka Prima.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1-9.
- Rusmandi, Murad, 2015, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung.
- Sitorus, O. 2014. Modul Hukum Tanah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, 2018. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Yogyakarta: Galangpress.

Yazid, F. 2020. *Pengantar Hukum Agraria*. Sumatera Utara: Undhar Press

Zumrohkhantum, S. Darda, S. 2014. *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Artikel dalam Jurnal

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.

Adnyani, N. K. S. (2013). Tinjauan Yuridis Sahnya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Kabupaten Karangasem. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(1).

Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2014), 19.

Darwin, N. K., & Djajaputra, G. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Menjadi Obyek Sengketa Serta Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Uu No 5 Tahun 1960. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 316-327.

Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870-888.

Faradita, G. G. (2023). *Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.

Ginting, S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Yang Dibuat Di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 130/Pdt. G/2012/Pn. Mlg). *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 3(1).

- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1521- 1531.
- Ilman, Z. (2024). Sengketa Tanah Daerah Rempang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (*Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*).
- Junaedi, J. (2024). Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (Hgu) Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Di Sektor Perkebun. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(7), 484-500.
- Kelmanutu, L., & Barauntu, F. (2024). Tinjauan Hukum Proses Jual Beli Tanah Dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pada Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Universitas Halmahera*, 17(2), 51-59.
- Latifah, M. (2021). Keabsahan Nota Kontan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 126-138.
- Nugroho, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Atas Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*).
- Pratiwi, R. N., & Najicha, F. U. (2021). Mengenai Macam-Macam Hak Atas Tanah Di Indonesia Sesuai Dengan Uupa. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Putra, M. (2017). Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 230-241.
- Putri, R. N., Pradita, E. L., Andari, S., & Kurniawati, W. (2024). Pengaruh Berbagai Jenis Tanah Dengan Berbagai Faktor-Faktor Pembentuk Yang Berbeda Terhadap Lingkungan. *Gabbah: Jurnal Pertanian Dan Perternakan*, 1(2), 41-48.
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1), 100-110.
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Ganec Swara*, 13(1), 120-125.
- Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 95.

Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

Sulaiman, N. (2023). Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin Di Pegunungan Karts Kendeng (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).

Suwardi, S., & Boediningsih, W. (2024). Kajian Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 488-500.

Wahid, A., Rohadi, R., & Sumartini, S. (2024). Disharmonisasi Kebijakan Politik Hukum Agraria: Analisis Hak Pengelolaan Tanah Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 25-35.)

Wibowo, M. D., Armono, Y. W., & Bidari, A. S. (2022). Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta. *Justicia Journal*, 11(1), 1-10.

Wowor, F. (2014). Fungsi badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa tanah. *Lex Privatum*, 2(2).

Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *lex Crimen*, 5(4).

Artikel dalam Internet

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 9

Peraturan menteri Atr Bpn Nomor 14 Tahun 2024

Awig Awig Desa Adat Tista